

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Umum PDAM Bantul**

Perumda Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 1 Desember 1990 tentang Perusahaan Air Minum Tingkat II Bantul. Kegiatan operasional perusahaan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum diresmikan pada 1 November 1992, berlandaskan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 721/KTPS/1992 tanggal 24 Oktober 1992 mengenai Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Dati II Bantul kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020, PDAM Bantul berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dengan nama Perumda Air Minum “Tirta Projotamansari” Kabupaten Bantul.

Air baku merupakan sumber air yang akan diolah di instalasi pengolahan air. Sumber air baku yang digunakan perusahaan berasal dari mata air, air permukaan, dan sumur dalam. Kapasitas air baku yang tersedia mencapai 971 liter per detik, dan dengan memanfaatkan sistem perpompaan serta gravitasi, pengambilan air baku untuk kebutuhan unit produksi dilakukan dengan debit sebesar 598,5 liter per detik. Kebutuhan air baku masih dapat terpenuhi dengan sumber air baku yang tersedia. Pada tahun buku 2023, kepemilikan Surat Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPA/SIP SDA) dalam rangka pemanfaatan air permukaan tersebut memiliki kondisi, sebagai berikut:

1. SIP SDA terkait pemanfaatan Sungai Opak di Kecamatan Jetis telah mendapatkan ijin pengambilan air/surat ijin pengelolaan sumber daya air dengan Nomor 1189/KPTS/M/2023 18 September 2023 terkait Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul pada Sungai Opak Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Usaha Air Minum. Ijin pengusahaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Cara pengambilan	: Dipompa
Kuota Air/Debit Air Baku	: 50 liter/detik (lima puluh liter per detik)
Jadwal Pengambilan	: 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
Masa Berlaku	: 5 Tahun (2023-2028)

2. SIP SDA terkait pemanfaatan Sungai Oyo di Kecamatan Imogiri telah mendapatkan ijin pengambilan air/surat ijin pengelolaan sumber daya air dengan Nomor 1484/KPTS/M/2023 tanggal 19 Oktober 2023 terkait Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari Kabupaten Bantul di Sungai Oyo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Usaha Air Minum. Ijin pengusahaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Cara pengambilan	: Dipompa
Kuota Air/Debit Air Baku	: 20 liter/detik (dua puluh liter per detik)
Jadwal Pengambilan	: 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
Masa Berlaku	: 5 Tahun (2023-2028)

3. Selain sumber air tersebut Perusahaan juga melakukan kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirtatama tentang pemanfaatan sistem penyediaan air minum regional di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan kapasitas 150 liter/detik, namun sampai akhir Tahun Buku 2023 baru terealisasi sebesar 100 liter/detik dan telah dimanfaatkan sebesar 87,94 liter/detik.

**Visi dari PDAM Bantul yaitu:**

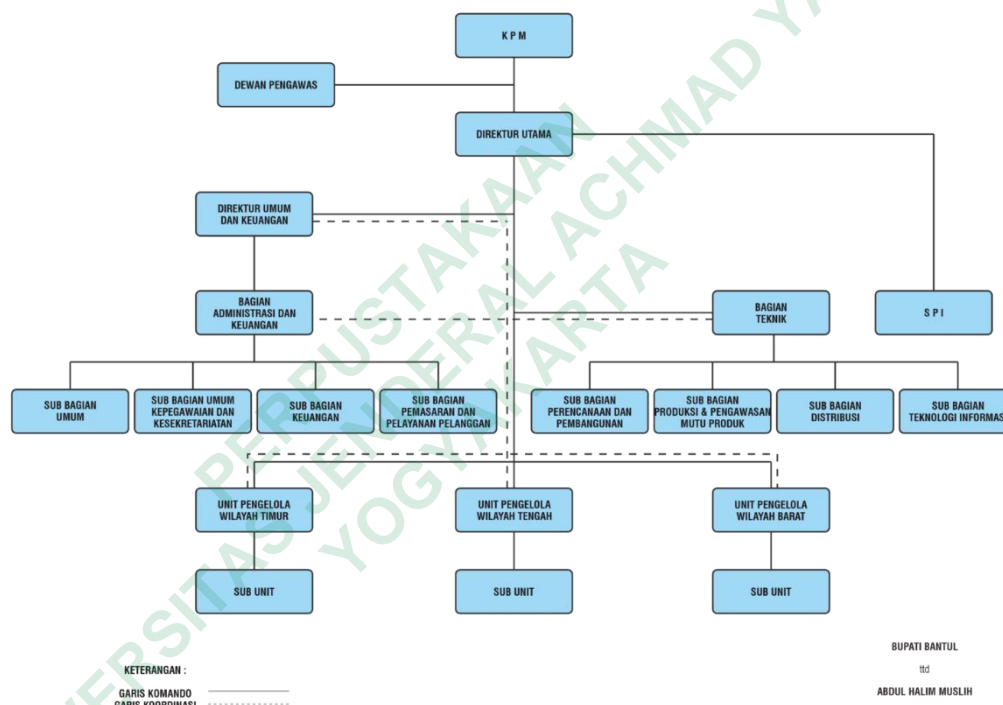
Menjadi Perusahaan yang Mandiri, Sehat & Profesional

**Misi dari PDAM Bantul yaitu:**

1. Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat kabupaten Bantul dan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan air minum.
3. Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan berkontribusi terhadap ekonomi pemerintah daerah kabupaten Bantul.

4. Menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen.

Struktur Organisasi PDAM Bantul dirancang untuk mendukung operasional perusahaan dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. Seperti halnya perusahaan daerah lainnya, struktur organisasi PDAM Bantul terdiri dari berbagai divisi dan unit yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk memastikan perusahaan berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah gambaran umum dari struktur organisasi PDAM Bantul:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

#### 1. KPM (Keterwakilan Pemilik Modal)

KPM tersebut adalah walikota sebagai pemilik atas nama pemerintah. Yang bertanggung jawab untuk:

- Menentukan dan menjalankan prosedur pengangkatan serta pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan evaluasi atas calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi;

- c. Menentukan besaran gaji, tunjangan, fasilitas, serta insentif kinerja bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
  - d. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
  - e. Menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Melakukan persetujuan terhadap Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - g. Menerima serta menyetujui dokumen Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja secara berkala;
  - h. Melakukan penyesuaian terhadap besaran modal dasar perusahaan.
2. Dewan Pengawas
- Ketua Dewan Pengawas: Bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja direksi dan memastikan operasional PDAM berjalan sesuai dengan visi, misi, dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
- Anggota Dewan Pengawas: Mendampingi ketua dalam memberikan saran dan pengawasan terhadap kebijakan strategis PDAM.
3. Direktur Utama
- Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan operasional PDAM. Tugasnya memimpin dan mengkoordinasi seluruh divisi dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan.
4. Direktur Teknik
- Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknis PDAM, termasuk sistem distribusi, perawatan fasilitas, serta inovasi teknologi pengolahan air.
- a. Subbagian Produksi: Mengelola sumber daya air, memastikan pasokan air yang sesuai standar kualitas.
  - b. Subbagian Distribusi: Mengurus jaringan distribusi air, memastikan pelanggan mendapatkan akses air dengan lancar dan teratur.

#### 5. Direktur Umum dan Keuangan

Mengelola aspek keuangan dan administrasi perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia.

- a. Subbagian Keuangan: Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pembayaran gaji, pengelolaan tagihan pelanggan, serta pelaporan anggaran.
- b. Subbagian Administrasi dan SDM: Mengelola sumber daya manusia, pelatihan pegawai, serta urusan administrasi lainnya.

#### 6. Direktur Pelayanan

Bertanggung jawab atas pelayanan kepada pelanggan, termasuk penanganan pengaduan, pemasaran, dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan.

- a. Subbagian Hubungan Pelanggan: Fokus pada penanganan keluhan pelanggan, pemasangan sambungan baru, dan menjaga kepuasan pelanggan.
- b. Subbagian Pemasaran: Mengembangkan strategi pemasaran layanan air bersih, memastikan masyarakat mengetahui layanan PDAM dan meningkatkan jangkauan layanan.

#### 7. Unit Pengolahan Air

Bertugas melakukan pengolahan air dari sumber air baku agar sesuai dengan standar kesehatan sebelum didistribusikan ke pelanggan.

#### 8. Unit Penelitian dan Pengembangan

Unit ini bertanggung jawab dalam melakukan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan air bersih serta mencari sumber air baru atau alternatif.

#### 9. Unit Inspeksi Internal

Bertugas melakukan audit dan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, efisiensi operasional, dan integritas keuangan perusahaan.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Penerapan *Green Accounting* Pada PDAM Bantul

#### a. Identifikasi

Tahap awal yang dilakukan perusahaan dalam menetapkan biaya penanganan eksternal yang mungkin timbul selama operasional yaitu dengan mengidentifikasi dampak negatif yang ada. Contoh kasus, sebuah PDAM yang diperhitungkan akan menghasilkan limbah berbahaya perlu terlebih dahulu mengenali jenis limbah yang mungkin timbul agar dapat menentukan penanganan khusus yang diperlukan (Hadi, 2012). Adapun tahapan identifikasi dari PDAM Bantul sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Identifikasi Biaya**

Wawancara	Analisis
<i>“Limbah yang dihasilkan dari pengolahan air yaitu tadi mas, dari proses sedimentasi dan filter itu menghasilkan limbah lumpur sedimentasi.” (K10)</i>	Proses identifikasi terlihat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air yang dilakukan. Proses ini dimulai dari subbagian produksi mengidentifikasi sumber
<i>“Ooo gini mas, kami di subbagian produksi ini merancang anggaran apa saja yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya airnya, termasuk biaya pemeliharaan tadi mas, jadi kami menganggarkannya mas di awal setelah itu anggarannya nanti diserahkan ke subbagian keuangan.” (K26)</i>	daya air dan membuat rancangan anggaran biaya terkait pengelolaan dan pemeliharaannya. Setelah itu, subbagian keuangan merincikan biaya dan menyetujuinya.
<i>“Nanti ada pihak ketiga mas untuk pembuangan limbah lumpur yang ditimbunkan di bak penampung.” (E13)</i>	
<i>“Untuk pengindentifikasian biaya-biaya yang timbul itu memang dilakukan oleh subbagian produksi, karena</i>	

Wawancara	Analisis
<p><i>perlu terjun lapangan langsung mas, lalu biaya yang sudah dianggarkan bagian produksi nantinya akan disetorkan ke bagian keuangan, setelah itu penetapan anggaran dari subbagian keuangan mas.”</i> (A7)</p>	
<p><i>“Nggih mas pasti ada, biaya yang dikeluarkan itu mas meliputi pemeliharaan pompa, pengolahan air, pengolahan sumber air, dan pemakaian bahan kimia.”</i> (A6)</p>	

Berdasarkan hasil diatas, pada bagian identifikasi pengelolaan sumber daya air, perusahaan telah melakukan identifikasi terkait pengelolaan dan pemeliharaan sampai dengan pembiayaannya. Adapun proses yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Bak Sedimentasi Dan Filtrasi**



**Gambar 4.3 Pipa Pembuangan Sedimentasi**



**Gambar 4.4 Pipa Pembuangan Filtrasi**



**Gambar 4.5 Bak Penampung Lumpur**

Berdasarkan hasil observasi, salah satu tempat pengelolaan sumber daya air PDAM Bantul terletak di desa srimulyo. Pada gambar 4.6 merupakan bak proses sedimentasi/pengendapan (yang berbentuk kerucut) dan bak filter/penyaringan (yang berbentuk tabung). Bak tersebut digunakan untuk mengendapkan lumpur dan menyaring kotoran dari air sungai yang ditampung. Proses pengendapan ini memungkinkan partikel berat turun ke dasar bak, sehingga air yang keluar dari bak sedimentasi sudah berkurang kandungan lumpurnya.

Selanjutnya, air hasil sedimentasi dialirkan ke bak filter untuk menjalani proses penyaringan. Pada tahap ini, air akan melewati media filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran halus, partikel organik, maupun anorganik yang masih tersisa, sehingga kualitas air yang dihasilkan menjadi lebih jernih dan layak untuk didistribusikan. Dari proses tersebut menghasilkan limbah lumpur.

Proses selanjutnya pada gambar 4.7 dan gambar 4.8 merupakan pipa pembuangan sedimentasi dan pembuangan filtrasi. Pipa tersebut digunakan untuk membuang hasil limbah lumpur bercampur air yang sudah diproses di bak sedimentasi dan filtrasi. Limbah lumpur nantinya akan mengalir ke bak penampungan lumpur seperti pada gambar 4.9 dalam bak ini lumpur dan air akan dipisahkan, lalu hanya air saja yang akan dialirkan ke sungai kembali. Kemudian limbah lumpurnya pada jangka 3 bulan sekali akan diangkut dari bak penampungan oleh pihak ketiga ke tempat penimbunan limbah lumpur yang sudah disediakan oleh PDAM Bantul.

Limbah lumpur dari PDAM merupakan hasil samping dari proses pengolahan air bersih. Limbah ini terbentuk terutama pada tahap koagulasi dan flokulasi, di mana bahan kimia seperti aluminium sulfat digunakan untuk mengendapkan partikel-partikel kotoran dari air baku. Kandungan aluminium yang tinggi dalam limbah lumpur PDAM tergolong sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan dapat menjadi sumber pencemaran jika tidak dikelola dengan baik.

Pada pengelolaan sumber daya air ini perusahaan juga telah melakukan identifikasi biaya. Adapun biaya yang dihasilkan dari proses ini sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Biaya Lingkungan PDAM Bantul**

No	Kegiatan	Rincian Biaya
1.	Pengelolaan sumber daya air	Biaya operasi dan pemeliharaan Terinci sebagai berikut: Biaya operasi dan pemeliharaan sumber & perpompaan Biaya operasi pengolahan air dan pemakaian bahan kimia Biaya operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi, perpompaan Biaya administrasi dan umum
2.	Pembuangan limbah lumpur	Biaya untuk Membayar kepada pihak ketiga untuk mengangkut limbah lumpur dari bak penampungan

Sumber: PDAM Bantul

**b. Pengakuan**

Setelah dampak tersebut diidentifikasi, dicatat sebagai akun atau pos biaya ketika manfaat dari dana yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan mulai diterima. Pengakuan biaya lingkungan melibatkan pencatatan formal dari semua biaya yang telah diidentifikasi sebelumnya ke dalam akun atau rekening yang sesuai dalam laporan keuangan (Hidayat & Sisdiyanto, 2025). Proses ini memastikan bahwa semua pengeluaran yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan tercermin dengan tepat dalam laporan keuangan. Adapun tahapan pengakuan dari PDAM Bantul sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pengakuan

Wawancara	Analisis
<p><i>“Pengakuan ya mas, emm untuk itu paling ya biayanya diakui sebagai beban di laporan laba rugi.”</i> (S10)</p> <p>Hal diatas didukung oleh hasil wawancara berikut:</p> <p><i>“Disini untuk pengakuan ya itu tadi mas biaya-biaya terkait pengolahan sumber daya air itu nanti diakui sebagai pos beban-beban.”</i> (A10)</p>	<p>Pengakuan biaya pengelolaan sumber daya air, perusahaan telah mengakui biaya pengelolaan sumber daya air dalam akun/pos beban pada laporan laba rugi. Selain itu perusahaan mencatat biayanya dengan metode akrual basis, karena biaya lingkungan dicatat oleh PDAM Bantul pada saat selesai menerima manfaatnya.</p>
<p><i>“Untuk biaya akan dicatat setelah menerima manfaatnya, jadi seperti umumnya perusahaan daerah disini menggunakan metode akrual mas.”</i> (A12)</p>	

Berdasarkan hasil diatas, perusahaan telah melakukan pengakuan biaya lingkungan menjadi beban pada laporan laba rugi. Pengakuan dikaitkan pada transaksi yang bisa saja dicatat maupun tidak dicatat dalam sistem pembukuan, sehingga berdampak pada laporan keuangan suatu entitas. Pengakuan dilakukan dengan memasukkan nominal uang dalam akun-akun pada laporan keuangan yang terdampak oleh peristiwa atau kejadian tersebut. PDAM Bantul menggunakan metode basis akrual untuk mengakui setiap transaksi, mengakui beban pada saat transaksi terjadi. Hal ini dikarenakan pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima.

### c. Pengukuran

Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan

sebesar yang dikeluarkan (Indrawati & Rini, 2018) . Adapun tahapan pengukuran dari perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Pengukuran**

Wawancara	Analisis
<i>“Ini mas untuk pengukuran kami mengukurnya dengan satuan moneter rupiah.” (S15)</i>	Pengukuran biaya pengelolaan sumber daya air terlihat dalam perusahaan mengukur dengan satuan moneter rupiah. PDAM Bantul menentukan biaya lingkungan mengacu realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan disesuaikan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).
<i>“biasa kan itu setiap tahunnya ada RKAP to mas, rutin sudah anggarannya sendiri , jadi kami menggunakan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.” (S14)</i>	
<i>“Oya pengukurannya dengan perkiraan tahun lalu dan disesuaikan dengan RKAP-nya.” (A13)</i>	

Perusahaan melakukan pengukuran biaya lingkungan untuk pengelolaan sumber daya air ini menggunakan satuan moneter rupiah. Hal ini dilihat pada akun-akun biaya pengelolaan sumber daya air, dimana jumlah nilai moneternya diakui dalam satuan rupiah. Hasil analisis di atas, menyatakan bahwa PDAM Bantul dalam pengelolaan sumber daya airnya untuk biayanya dengan mengacu realisasi anggaran dan belanja periode sebelumnya sebagai acuan disesuaikan dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Pengelolaan limbah PDAM Bantul bekerja sama dengan pihak ketiga dan pencatatan sebagai program pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air.

#### **d. Penyajian**

Penyajian dalam proses akuntansi adalah metode pelaporan elemen atau akun-akun dalam laporan keuangan sehingga elemen atau pos tersebut menjadi informatif. Standar akuntansi biaya mengatur ketentuan tentang apakah suatu informasi harus disajikan secara terpisah dari laporan keuangan utama, atau digabung bersama dengan akun

laporan keuangan yang lain (Ardiana & Ervina, 2021). Adapun tahapan penyajian dari perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Penyajian**

Wawancara	Analisis
<p><i>“Masih campur dengan laporan yang lainnya, tapi nanti tetap bagian pengelolaan sumber daya airnya masih ada klopnya sendiri.”</i> (S18)</p> <p>Hal diatas didukung oleh hasil wawancara berikut:</p> <p><i>“Untuk penyajian laporan biaya lingkungan ini mas masih belum ada secara khusus, mungkin cuma sederhana mas di laporan laba rugi.”</i> (A17)</p>	<p>Penyajian laporan biaya pengelolaan sumber daya air terlihat dalam perusahaan menyajikan pada laporan laba rugi, akan tetapi PDAM Bantul dalam menyajikan biaya lingkungan belum disajikan secara khusus atau masih bercampur.</p>
<p><i>“Biaya-biaya lingkungan nanti disajikan di laporan laba rugi mas.”</i> (A16)</p>	

Penyajian mengenai biaya lingkungan untuk pengelolaan sumber daya air di PDAM Bantul masih disatukan dengan biaya lainnya, dan belum terdapat penyajian khusus untuk biaya pengelolaan sumber daya air dalam laporan keuangan. Adapun akun-penyajian laporan biaya lingkungan pada perusahaan meliputi:

**Tabel 4.6 Penyajian Laporan Biaya Lingkungan**

Kode rekening	Rincian
xxxx	Beban operasi dan pemeliharaan Terinci sebagai berikut:
xxxx	Beban operasi dan pemeliharaan sumber & perpompaan
xxxx	Beban operasi pengolahan air dan pemakaian bahan kimia
xxxx	

Kode rekening	Rincian
xxxx	Beban operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi, perpompaan
	Beban administrasi dan umum

Sumber: PDAM Bantul

#### e. Pengungkapan

Pengungkapan ini menegaskan bahwa informasi keuangan yang diperoleh harus disajikan secara terbuka dan tidak boleh disembunyikan atau disamarkan (Kurnia & Zulhelmi, 2024). Informasi ini disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi terpisah (jika tersedia), serta laporan perubahan ekuitas, dan membutuhkan pengungkapan tambahan pada pos-pos lain dalam laporan keuangan tersebut atau dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun tahapan pengakuan perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Pengungkapan**

Wawancara	Analisis
<p>“Terkait pengungkapan, di PDAM ini mengungkapkannya dalam CALK mas.” (A19)</p>	<p>Pengungkapan laporan biaya pengelolaan sumber daya air terlihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sebagai beban operasional, meskipun tidak dijabarkan secara rinci atau khusus, biaya tersebut tetap termasuk dalam beban operasional.</p>
<p>“Jadi di CALK nanti diungkapkannya sebagai beban operasional.” (S21)</p> <p>Hal diatas didukung oleh hasil wawancara berikut:</p>	
<p>“Pada CALK atau catatan atas laporan keuangan mas, PDAM Bantul ini mengungkapkan biaya pengelolaan sumber daya air sebagai beban, lalu dirincikan beban-bebannya, nanti saya lihatlan dokumennya mas.” (A20)</p>	

Pengungkapan biaya lingkungan terkait pengelolaan sumber daya air di PDAM Bantul telah dilakukan, seperti terlihat pada tabel di atas,

di mana dalam Catatan Atas Laporan Keuangan biaya lingkungan dicatat sebagai beban operasional. Namun demikian, biaya lingkungan tersebut disatukan dengan biaya operasional lain yang sejenis, sehingga tidak ada akun khusus maupun laporan terpisah yang secara khusus membahas biaya lingkungan.

Perusahaan ini menyampaikan informasi terkait laporan keuangannya melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk masyarakat, PDAM Bantul mengakui biaya lingkungan sebagai bagian dari beban operasi dan pemeliharaan dalam pelaporannya. Untuk memperkuat hasil wawancara di atas, peneliti juga mendapatkan bukti dokumen terkait pengungkapan biaya lingkungan adalah sebagai berikut:

PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL		
Penjelasan Pos-Pos Laba Rugi		
Tahun buku berakhir 31 Desember 2024		
<b>7). Beban Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>21.330.099.100,27</b>	<b>20.738.745.764,72</b>
Jumlah tersebut merupakan beban operasi dan pemeliharaan tahun 2024 dan 2023.		
Beban Operasi dan Pemeliharaan terinci sebagai berikut:		
- Beban Operasi dan Pemeliharaan Sumber dan Perpompaan	1.369.995.162,00	1.459.056.040,00
- Beban Operasi Pengolahan Air dan Pemakaian Bahan Kimia	9.235.456.270,00	8.671.573.745,00
- Beban Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi, Perpompaan	1.441.186.400,26	1.696.980.632,48
- Beban Administrasi dan Umum	9.283.461.268,01	8.911.135.347,24
<b>Jumlah</b>	<b>21.330.099.100,27</b>	<b>20.738.745.764,72</b>
Beban Operasi dan Pemeliharaan Sumber dan Perpompaan tahun 2024 sebesar Rp1.369.995.162,00 terinci sebagai berikut:		
- Pemeliharaan Sumur	419.713.710,00	350.346.100,00
- Operasi Sumber	446.791.748,00	636.674.291,00
- Retribusi ASB	392.378.085,00	380.692.899,00
- Retribusi Air Permukaan	111.111.619,00	91.142.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.369.995.162,00</b>	<b>1.459.056.040,00</b>
Beban Operasi Pengolahan Air dan Pemakaian Bahan tahun 2024 sebesar Rp9.235.456.270,00 terinci sebagai berikut:		
- Beban Operasi Pengolahan Air	-	130.966.720,00
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	2.887.642.800,00	2.067.822.400,00
- Beban Pembelian Air Curah	6.042.722.400,00	5.592.045.125,00
- Pemeliharaan Pengolahan	28.331.000,00	280.939.500,00
- Pemeliharaan Pengolahan	278.780.070,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.235.456.270,00</b>	<b>8.671.573.745,00</b>
Beban pemakaian bahan kimia sebesar Rp2.887.642.800,00 merupakan pemakaian bahan kimia PAC untuk pengolahan air di Piyungan, Guwosari, Sedayu, Banguntapan, Kamijoro, Dingo dan lain-lain. Beban Air Curah merupakan pembelian air dengan SPAM Regional Provinsi DIY tahun 2024.		
Beban Operasi dan Pemeliharaan Transmisi Distribusi tahun 2024 Rp1.441.186.400,26 terinci sebagai berikut:		
= Beban Operasi TRANDIS	528.139.190,00	875.271.173,44
- Pemeliharaan TRANDIS Lainnya	913.047.210,26	821.709.459,04
<b>Jumlah</b>	<b>1.441.186.400,26</b>	<b>1.696.980.632,48</b>
Beban Administrasi dan Umum tahun 2024 Rp9.283.461.268,01 terinci sebagai berikut:		
- Beban Operasional	1.859.695.044,00	1.843.983.785,00
- Beban Keuangan	-	-
- Beban Kantor	690.714.970,00	528.199.583,00
- Beban Hubungan Langganan	1.031.398.840,00	1.018.136.488,00
- Beban survey dan Pengembangan	44.770.000,00	117.523.293,00
- Beban Pemeliharaan	334.064.909,00	194.860.093,00
- Rupa-Rupa beban Umum	5.322.847.705,01	5.208.432.107,24
<b>Jumlah</b>	<b>9.283.461.268,01</b>	<b>8.911.135.347,24</b>

#### Gambar 4.10 Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024

Berdasarkan hasil dokumen yang di atas, pengungkapan biaya lingkungan terkait pengelolaan sumber daya air ini diungkapkan sebagai beban operasi dan pemeliharaan yang terinci beban operasi dan pemeliharaan sumber & perpompaan, beban operasi pengolahan air dan pemakaian bahan kimia, beban operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi, perpompaan, serta beban administrasi dan umum.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada tahun buku berakhir 31 Desember 2024.

## **2. Perbandingan Penerapan *Green Accounting* Pada PDAM Bantul Berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015**

Berdasarkan hasil analisis di atas perbedaan penerapan *green accounting* untuk pengelolaan sumber daya air yang sudah diterapkan di perusahaan dengan berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015 yaitu terletak pada yang pertama bagian identifikasinya, PDAM Bantul telah mengidentifikasi biaya lingkungan, yang dibuktikan dengan adanya pengeluaran biaya terkait lingkungan oleh perusahaan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan alokasi biaya lingkungan berdasarkan klasifikasi biaya menurut Hansen dan Mowen (2009). Kedua, penyajian laporan biaya lingkungan sudah sesuai dengan PSAK, namun tidak disajikan terpisah atau secara khusus. Ketiga, pengungkapan biaya lingkungan sudah tercantum dalam CALK sebagai bagian dari beban operasional, namun biaya tersebut digabungkan dengan biaya operasional lain yang sejenis sehingga tidak terdapat akun khusus atau laporan terpisah yang secara khusus membahas biaya lingkungan.

### **C. Hasil Pembahasan**

#### **1. Penerapan Penerapan *Green Accounting* Pada PDAM Bantul**

Konsep *green accounting* merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan (Hidayat & Sisdianto, 2025). Khususnya pada perusahaan penyedia air seperti PDAM, penerapan konsep ini menjadi penting karena dengan mengukur dan melaporkan biaya lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang timbul dari pengolahan air, pengelolaan limbah, serta upaya konservasi sumber daya air (Ray & Wijayana, 2021). Oleh karena itu, penerapan *green accounting* pada setiap perusahaan tidak dapat diabaikan dan harus dilakukan secara baik dan konsisten. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sekaligus menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Penerapan *green accounting* di perusahaan ini terkait dengan pengelolaan sumber daya air, di mana pengelolaan tersebut melibatkan proses sedimentasi dan filtrasi yang menghasilkan limbah lumpur. Pengelolaan tersebut sudah dilakukan tahapan alokasi biaya *green accounting* yakni identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini sejalan dengan menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 yaitu tahapan dari pengalokasian biaya lingkungan meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Te & Aurelia, 2024).

Konsep kesesuaian teori legitimasi terkait strategi perusahaan harus memastikan kegiatan operasionalnya tetap sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tempat perusahaan beroperasi, sehingga memperoleh penerimaan dari masyarakat (Rohim & Hardiningsih, 2022). Hal ini dapat dilihat dari segi perusahaan mengelola sumber daya airnya dengan baik. Pengelolaan ini dimulai dari proses identifikasi oleh subbagian produksi, yang merancang anggaran kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air, termasuk biaya operasional, pemeliharaan pompa, penggunaan bahan kimia, dan pengelolaan limbah lumpur hasil sedimentasi dan filtrasi. Seluruh anggaran yang telah dirancang kemudian disetujui dan dicatat oleh subbagian keuangan, sehingga setiap biaya terkait pengelolaan sumber daya air dapat terpantau dan tercatat dengan baik. Setelah seluruh anggaran pengelolaan sumber daya air disusun dan disetujui, langkah berikutnya adalah melakukan pengakuan biaya tersebut secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan.

Pada proses pengakuan, biaya lingkungan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, menggunakan metode akrual basis. Artinya, biaya dicatat pada saat manfaat diperoleh, meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Hal ini memastikan setiap transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tercatat secara sistematis dan berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya tahapan pengukuran, PDAM Bantul menggunakan satuan moneter rupiah dalam mencatat biaya

lingkungan. Pengukuran ini berlandaskan atas realisasi anggaran tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Seluruh biaya yang berhubungan pada pengolahan limbah lumpur dan sumber daya air diakui dalam akun biaya operasional dan pemeliharaan.

Pada aspek penyajian, biaya lingkungan belum ditampilkan secara terpisah dalam laporan keuangan, melainkan masih digabungkan dengan biaya operasional lainnya. Meski demikian, terdapat bagian tersendiri yang mencerminkan biaya pengelolaan sumber daya air dalam laporan laba rugi, namun tidak ada akun khusus yang secara eksplisit menunjukkan biaya lingkungan. Terkait pengungkapan, PDAM Bantul mengungkapkan biaya lingkungan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai beban operasional. Namun, pengungkapan ini masih bersifat umum dan belum dirinci secara khusus sebagai biaya lingkungan, sehingga transparansi terhadap biaya lingkungan masih terbatas.

## 2. Perbandingan Penerapan *Green Accounting* Pada PDAM Bantul Berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015

**Tabel 4.8 Perbandingan *Green Accounting* Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 dan PDAM Bantul**

PSAK No. 1 Tahun 2015	PDAM Bantul	Keterangan
Identifikasi: PSAK No. 1 Tahun 2015 Paragraf 49, Entitas atau perusahaan perlu mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam publikasi yang sama.	Identifikasi: PDAM Bantul telah mengalokasikan biaya untuk pengelolaan lingkungan terkait sumber daya air.	Sesuai
Pengakuan:	Pengakuan:	Sesuai

PSAK No. 1 Tahun 2015	PDAM Bantul	Keterangan
<p>PSAK No.1 Tahun 2015 Paragraf 82, Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi.</p>	<p>Pengakuan biaya pengelolaan sumber daya air, PDAM Bantul telah mengakui biaya pengelolaan sumber daya air dalam akun/pos beban pada laporan laba rugi.</p>	
<p>Pengukuran: PSAK No.1 Tahun 2015 Paragraf 99, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam neraca dan laporan laba rugi.</p>	<p>Pengukuran: PDAM Bantul mengukur atau menentukan biaya lingkungan dengan mengacu realisasi anggaran tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Selain itu perusahaan mencatat biayanya dengan metode akrual basis.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Penyajian: PSAK Tahun 2015 No. 1 Paragraf 15, laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.</p>	<p>Penyajian: Penyajian laporan biaya pengelolaan sumber daya air terlihat dalam perusahaan menyajikan pada laporan laba rugi,</p>	<p>Tidak sesuai</p>

PSAK No. 1 Tahun 2015	PDAM Bantul	Keterangan
	akan tetapi PDAM Bantul dalam menyajikan biaya lingkungan belum disajikan secara khusus atau masih dibebankan pada biaya operasional dan pemeliharaan.	
<p>Pengungkapan: PSAK No.1 Tahun 2015 Paragraf 47, mengharuskan adanya pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan perubahan ekuitas, serta memerlukan pengungkapan tambahan dari pos-pos lain dalam laporan keuangan tersebut atau dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>Pengungkapan: PDAM Bantul telah mengungkapkan laporan biaya pengelolaan sumber daya air terlihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sebagai beban operasional, walaupun tidak di rincikan dan diungkapkan secara khusus.</p>	Tidak sesuai

Berdasarkan hasil analisis, perbandingan penerapan *green accounting* untuk pengelolaan sumber daya air di perusahaan dengan berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015, yang mencakup lima tahapan alokasi *green accounting*, menunjukkan bahwa tahapan alokasi biaya *green accounting* ini secara keseluruhan komponen sudah ada dan berfungsi, namun terdapat dua tahapan yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu pada penyajian dan pengungkapan. Oleh karena itu perusahaan perlu lebih lanjut melakukan

tahapan alokasi *green accounting* yang ada supaya kekurangan-kekurangan dalam tahapan ini dapat dipenuhi dan mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai maksimal.

Adapun untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PDAM Bantul terkait pengelolaan sumber daya air, peneliti melakukan identifikasi biaya lingkungan yang tercantum dalam laporan keuangan berdasarkan klasifikasi biaya lingkungan menurut Hansen & Mowen (2009), yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal:

**Tabel 4.9 Kesesuaian Kategori Biaya Menurut Hansen & Mowen (2009) Dengan PDAM Bantul**

Kategori Biaya Menurut Hansen dan Mowen (2009)	Biaya lingkungan PDAM Bantul	Keterangan
Biaya pencegahan lingkungan: Biaya-biaya untuk mencegah produksi limbah yang dapat membahayakan lingkungan.	Biaya pencegahan lingkungan:	Tidak Sesuai
Biaya deteksi lingkungan: Biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan standar lingkungan.	Biaya deteksi lingkungan: - Biaya operasi pengolahan air dan pemakaian bahan kimia	Sesuai
Biaya kegagalan internal: Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat mengelola limbah, tetapi tidak dibuang di luar lingkungan perusahaan.	Biaya kegagalan internal: - Biaya operasi dan pemeliharaan sumber & perpompaan	Sesuai

Kategori Biaya Menurut Hansen dan Mowen (2009)	Biaya lingkungan PDAM Bantul	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi, perpompaan</li> </ul>	
<p>Biaya kegagalan eksternal: Biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil setelah limbah atau sampah dibuang ke lingkungan di luar perusahaan.</p>	<p>Biaya kegagalan eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membayar kepada pihak ketiga untuk mengangkut limbah lumpur dari bak penampungan</li> <li>- Biaya administrasi dan umum</li> </ul>	Sesuai

Penerapan biaya lingkungan di PDAM Bantul berdasarkan Hansen & Mowen (2009) masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hal alokasi biaya lingkungan. Hal ini dikarenakan PDAM Bantul tidak memasukkan biaya pencegahan pada laporannya, sehingga menyebabkan biaya tersebut menurut teori Hansen & Mowen (2009) tidak sesuai.

PDAM Bantul dalam mengalokasikan biaya deteksi melibatkan biaya yang terkait dengan operasi pengolahan air dan pemakaian bahan kimia. Hal ini sejalan dengan teori Hansen & Mowen (2009) mengenai *green accounting* untuk biaya ini, yang bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan usaha mereka mematuhi standar lingkungan. Pengolahan air yang

dilakukan PDAM Bantul dilakukan mulai dari proses sedimentasi dan filtrasi sampai dengan pembuangan limbah lumpur.

Biaya kegagalan internal yang dialokasikan PDAM Bantul untuk pengelolaan sumber daya air antara lain biaya operasi dan pemeliharaan sumber & perpompaan, maupun operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi, perpompaan. Hal ini sejalan dengan teori Hansen & Mowen (2009) menyatakan bahwa biaya kegagalan internal mencakup alokasi biaya untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air, namun hasil limbah dari kegiatan tersebut tidak dibuang ke lingkungan luar melainkan ditimbun pada bak penampung limbah lumpur sedimentasi. Peneliti dapat mengilustrasikan salah satu biaya ini melalui biaya operasi dan pemeliharaan sumber & perpompaan yang dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya air di PDAM Bantul secara internal dan hasil dari limbah tersebut tidak dibuang ke lingkungan luar PDAM Bantul.

PDAM Bantul mengalokasikan biaya kegagalan eksternal melalui pembayaran kepada pihak ketiga untuk mengangkut limbah lumpur dari bak penampungan yang mana pihak ketiga tersebut merupakan pekerja harian lepas. dengan teori Hansen & Mowen (2009) tentang *green accounting*, yang menyatakan bahwa pengalokasian biaya kegagalan eksternal mencakup biaya pengelolaan limbah yang dibuang ke lingkungan luar. PDAM Bantul menghasilkan limbah lumpur dalam jumlah cukup besar, sementara fasilitas penampungannya masih kurang memadai. Kondisi ini tercermin dari tingginya biaya kegagalan eksternal yang dikeluarkan untuk membayar pihak ketiga dalam pengelolaan limbah lumpur tersebut.

PDAM Bantul tidak memasukkan biaya pencegahan ke dalam biaya lingkungan, walaupun sudah mengalokasikan biaya deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal sebagai bagian dari biaya lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PDAM Bantul belum sepenuhnya mengimplementasikan teori Hansen & Mowen (2009) tentang *green accounting*, karena masih ada satu komponen biaya yang belum dialokasikan.

Berdasarkan hal di atas, fenomena awal yang peneliti temukan yaitu masih terdapatnya biaya yang belum dicatat seperti biaya pencegahan lingkungan di atas. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang masih belum secara khusus dan dirincikan, hal ini merupakan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada penerapan *green accounting* untuk pengelolaan sumber daya air berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015 ini perusahaan membutuhkan implementasi yang lebih lanjut untuk mengatasi kekurangan di atas. Penerapan ini yaitu melalui *green accounting* yang dilakukan secara komprehensif dan dilakukan secara terstruktur, sehingga perusahaan dapat mampu menutup kekurangan yang ada, khususnya pada tahapan penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan lingkungan khususnya sumber daya air.